

**FACTOR OF THE FACTORS THAT CAUSE A SHIFT IN THE ROLE
OF THE STAKEHOLDERS THE CUSTOM IN THE VILLAGE IN
THE VILLAGE OF BANJAR BENAI THE DISTRICT BENAI OF
KUANTAN SINGINGI**

Riska Tri Purnama¹, Sri Erlinda², Gimin³

email: riskatripurnama@gmail.com, linda_sri70@yahoo.com ,gim_ur@yahoo.co.id
No. HP 0823 8166 6338

Study Program PPKn
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University

Abstract: *The study aims to know the role of stakeholders the custom in the village and the factors that cause a shift in the role of stakeholders the custom in the village in the village of Banjar Benai the district Benai of Kuantan Singingi. "The population in this study is the village of Banjar Benai the 3767 with 973 the head of the family are scattered in 7 villages with a sample of 97 families. The instrument collection of data and questionnaire consisting of 26 questions and interview, then the data are analyzed with descriptive of a qualitative through a percentage . from the percentage of the answers of respondents obtained answers about the role of stakeholders the custom in the village in the village of Banjar Benai the district Benai of Kuantan Singingi in the category of yes with a percentage of 75,3%, and respondents who answered did not is 24,7 %. the role of holders of the shift is in terms of divorce, the forest land, livestock, field, civil case and criminal . regarding the causes of the role of stakeholders the custom in the village in the village of Banjar Benai the district Benai of Kuantan Singingi in the category of yes with a percentage of 44% and respondents who answered did not is 56%, you know the cause of the role of stakeholders the custom in the village in the village of Banjar Benai the district Benai of Kuantan Singingi of factors: contact with other cultures, the influence of other cultures, public dissatisfaction to the field of certain areas, formal systems of education world, people are heterogeneous, the desire to move forward, increasing the population, tolerance of the action deviated (deviation), which is not an offense, the discovery of the discovery of new and open society (open stratification).*

Keywords: *The Role Of Traditional Authorities*

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERGESERAN PERAN PEMANGKU ADAT DALAM PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANJAR BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Riska Tri Purnama¹, Sri Erlinda², Gimin³

email: riskatripurnama@gmail.com, linda_sri70@yahoo.com, gim_ur@yahoo.co.id
No. HP 0823 8166 6338

Program Studi PPKn
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa dan Faktor-Faktor penyebab pergeseran peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.” Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Banjar Benai yang berjumlah 3767 dengan 973 KK yang tersebar dalam 7 Dusun dengan sampel 97 KK. Instrumen pengumpulan data yaitu angket terdiri dari 26 pertanyaan serta wawancara. Kemudian Data dianalisa dengan Deskriptif Kualitatif melalui persentase. Dari perhitungan persentase jawaban responden di peroleh jawaban mengenai pergeseran peran pemangku ada dalam pemerintahan desa di desa banjar benai kecamatan benai kabupaten kuantan singingi pada kategori Ya dengan persentase sebesar 75,3% , dan responden yang menjawab Tidak adalah 24,7%. peran pemangku adat yang bergeser adalah dalam segi perceraian, hutan tanah, ternak, ladang, perkara perdata dan perkara pidana. mengenai Faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi pada kategori Ya dengan persentase sebesar 44% , dan responden yang menjawab Tidak adalah 56%. Faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa di desa banjar benai kecamatan benai kabupaten kuantan singingi yaitu Faktor: kontak dengan kebudayaan lain, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, Sistem pendidikan formal yang maju, penduduk yang heterogen, keinginan keinginan untuk maju, bertambahnya penduduk, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*) yaitu bukan merupakan delik dan penemuan penemuan baru dan terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*).

Kata Kunci: Peran Pemangku Adat

PENDAHULUAN

Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam suatu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya. (S Sumarsono:2005:8)

Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia merdeka. Kumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu hidup di Desa-Desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Sejarah perjalanan tata Pemerintahan Desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional. Perubahan itu sejalan dengan politik hukum nasional yang dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Ketika Indonesia merdeka, Pemerintahan Desa mempunyai landasan konstitusional. Pasal 18 UUD 1945, Saat ini Negara telah melakukan redistribusi sumber daya serta memberikan mandat kewenangan dan pembangunan kepada desa yang didahului dengan dengan sebuah pengakuan dan penghormatan secara penuh sebagaimana tersurat didalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Pattiro:2015:V)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap masyarakat pasti memiliki sistem nilai yang dipedomani dan dihargai oleh masyarakat tersebut dalam interaksi sosialnya. Nilai-nilai tersebut sepanjang memang Fungsional, akan tetap hidup dan mentradisi dalam masyarakat itu dinamakan adat istiadat. Karena nilai-nilai itu mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan diyakini kebenarannya dan oleh karenanya menjadi pedoman kehidupan sosial masyarakat tersebut, maka dinamakan hukum adat. Sebab hal tersebut bukan saja berwujud aturan-aturan yang dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi, melainkan juga berfungsi sebagai legitimasi sosial dan politik masyarakat tersebut sebagai suatu sistem sosial. (Suwardi MS, Dkk:2006:53).

Pemegang Terajuk Adat Kuantan Singingi pada lapisan paling atas terdiri dari 9 orang datuk dengan Wilayah kekuasaan masing-masing. Mereka ini pernah juga disebut *Urang Godang/ Orang Godang*. Kesatuan para Datuk ini dapat membentuk *Federasi*. Tiap Datuk mempunyai otonomi (kekuasaan) untuk mengurus dan memelihara Wilayah kekuasaannya masing-masing. Untuk kepentingan itu meraka membuat Undang-Undang (Ketentuan Adat) demi kepentingan Pemerintahannya. Karena itu meskipun pada prinsipnya para Datuk ini mempunyai dasar-dasar adat yang sama, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat wilayah kekuasaannya bisa terjadi beberapa variasi. Dengan rangkaian kata adat, Datuk atau *Orang Godang* ini disebut *pucuk bulat dan urat tunggang dalam luhak* dengan tugas *tanah lah babingka* (wilayah kekuasaan telah dibentuk) *luhak lah bekabung* (Wilayah kekuasaan sudah di bagi-bagi atas beberapa Negeri, agar mudah dipimpin) *rantau beraja* (tiap Negeri mempunyai Pemimpin) pakaiannya adalah pakaian melayu, berkupiah berpita hitam kain beledru, memakai pending emas serta bersisip keris pusaka.

Pada lapisan kedua di bawah *Orang Godang* atau para Datuk yang memimpin luhak terdapatlah lapisan Pemangku Adat yang memimpin Negeri dan sukunya. Tiap Negeri biasanya mempunyai 4 suku besar. Di Taluk Kuantan misalnya ada 4 suku utama yakni suku *Tigo*, suku *Ompek*, suku *Limo*, suku *Onam*. Datuk Bisai sebagai *orang godang limo* koto di tengah termasuk suku *ompek*. Di siberakun hanya ada 3 suku utama Caromin, Petayo, dan Kampung tonga. Karena itu di negeri ini hanya ada 3 Pengulu, berempat dengan datu Bisai. Tiap suku dipandu oleh 3 orang Pemangku Adat, yaitu Penghulu, Monti, Dubalang dan seorang tokoh agama Islam yang disebut Malim (Malin), karena ada 3 orang Pemangku Adat dalam satu suku, maka setiap suku dibagi menjadi 3 Jurai (Jurusan). Maka ada Jurai Penghulu, Jurai Monti dan Jurai Dubalang. Karena Jurai memberikan keturunan, maka jurai disebut juga dengan kata *poruik* (perut). Dalam setiap *porui* (jurai) ini masih ada lagi beberapa kelompok yang semuanya merupakan pertalian ibu (UU Hamidy: 2000:25).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Niniak Mamak (Pemangku Adat) di Desa Banjar Benai yaitu Datuk Syaiful Anwar Peran Pemangku Adat di Desa Banjar Benai seiring perkembangan zaman terjadi pergeseran yaitu:

1. Apabila anak kemenakan menjual tanah biasanya mereka memberitahu Pemangku Adat terlebih dahulu dan Pemangku Adat yang nantinya yang akan mencarikan orang yang mau membelinya yaitu dengan syarat harus orang suku yang bersangkutan supaya tanah tidak jatuh kepada suku lain.
2. Masalah pengurusan surat tanah dulu di lakukan oleh Pemangku Adat tetapi pada saat ini Pemangku Adat tidak dilibatkan lagi.
3. Dalam menyelesaikan kasus Perdata dan Pidana dulu merupakan tanggung jawab dari Pemangku Adat, Perdata yaitu masalah Tanah, Adat Istiadat dan menangani anak cucu kemenakan tetapi pada saat sekarang ini sudah jarang dilibatkan, sedangkan Pidana yaitu menangani masalah pelanggaran pidana yang ringan seperti terjadi pertengkaran antara anak kemenakan yang menyebabkan kerugian salah satu pihak dan terjadi kecelakaan yang tidak menelan korban dulu merupakan tanggung jawab pemangku adat dalam menyelesaikannya kecuali terjadi pelanggaran pidana berat baru diselesaikan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwenang tapi pada saat sekarang ini sudah jarang pemangku adat di libatkan.
4. Pemangku Adat sangat dihormati misalnya saat adat acara Kelahiran Anak dan Syukuran Pemangku Adat yang diutamakan oleh anak cucu Kemanakannya sekarang tidak lagi atau sudah bergeser
5. Ketentuan turun keladang dan pengembalaan ternak juga termasuk dibawah kendali pemangku adat, sementara itu didalam berbagai upacara, seperti upacara turun keladang, mengepung ikan, mebuca belantara menjadi kebun dan ladang, mendirikan rumah, mencari kayu jalur dulu juga merupakan tanggung jawab pemangku adat tapi pada saat sekarang ini perannya sudah mulai bergeser karena semua sudah ditangani oleh pemerintah Desa

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu Apakah Peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa yang bergeser dan apa sajakah Faktor penyebab pergeseran peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi?

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :Untuk mengetahui pergeseran peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa dan Faktor-Faktor penyebab pergeseran peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.”

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilaksanakan Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Desember sampai Januari 2017 sedangkan yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Banjar Benai yang berjumlah 3767 dengan 973 KK yang tersebar dalam 7 Dusun.

Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari jumlah populasi yaitu $973 \times 10\%$.Maka diperoleh sampel sebesar 97 KK. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 108)

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam mengumpulkan data menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam menguji hipotesis maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi: Observasi, Wawancara, Angket, Dokumentasi, dan Studi Kepustakaan.

TEKNIK ANALISA DATA

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada dilapangan, maka data yang akan diperoleh akan dianalisa dengan sistem deskriptif kualitatif dengan persentase. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \% \quad (\text{Anas Sudijono;2008:40}).$$

Adapun tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut: Apabila jawaban responden sebesar 50,01% - 100%= Ya dan Apabila jawaban responden sebesar 0% - 50% =Tidak

(Dikutip dalam Jati Kuntari, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemangku Adat dalam Pemerintahan Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Peran pemangku adat dalam pemerintahan desa ada 8 (delapan) yaitu: peran dalam segi Nikah-Kawin, Perceraian, Hutan Tanah, Ternak, Ladang, Harta Pusaka, Perkara Pidana dan Perkara Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dari 8 (delapan) peran pemangku adat ada 6 (enam) peran yang bergeser yaitu sebagai berikut:

1. Peran Pemangku Adat dalam segi Perceraian

Tabel 1. Peran Pemangku Adat dalam segi Perceraian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	87	89,7
2.	Tidak	10	10,3
	Jumlah	97	100

(Sumber: Data olahan 2017)

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa 87 responden (89,7%) menjawab Ya untuk pergeseran Peran Pemangku Adat dalam segi Perceraian, 10 responden (10,3%) menjawab Tidak.

2. Peran Pemangku Adat dalam segi Hutan Tanah

Tabel 2. Peran Pemangku Adat dalam segi Hutan Tanah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	78	80,4
2.	Tidak	19	19,6
	Jumlah	97	100

(Sumber: Data olahan 2017)

Dari tabel 2 dapat disimpulkan bahwa 78 responden (80,4%) menjawab Ya untuk pergeseran Peran Pemangku Adat dalam segi Hutan Tanah, 19 responden (19,6%) menjawab Tidak.

3. Peran Pemangku Adat dalam segi Ternak

Tabel 3. Peran Pemangku Adat dalam segi Ternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	89	91,8
2.	Tidak	8	8,2
Jumlah		97	100

(Sumber: Data olahan 2017)

Dari tabel 3 dapat disimpulkan bahwa 89 responden (91,8%) menjawab Ya untuk pergeseran Peran Pemangku Adat dalam segi Ternak, 8 responden (8,2%) menjawab Tidak.

4. Peran Pemangku Adat dalam segi Ladang

Tabel 4. Peran Pemangku Adat dalam segi Ladang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	88	90,7
2.	Tidak	9	9,3
Jumlah		97	100

(Sumber: Data olahan 2017)

Dari tabel 4 dapat disimpulkan bahwa 88 responden (90,7%) menjawab Ya untuk pergeseran Peran Pemangku Adat dalam segi Ladang, 9 responden (9,3%) menjawab Tidak.

5. Peran Pemangku Adat dalam segi perkara pidana

Tabel 5. Peran Pemangku Adat dalam segi Perkara Pidana Pidana

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	89	91,8
2.	Tidak	8	8,2
Jumlah		97	100

(Sumber: Data olahan 2017)

Dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa 89 responden (91,8%) menjawab Ya untuk pergeseran Peran Pemangku Adat dalam segi Ladang, 8 responden (8,2%) menjawab Tidak.

6. Peran Pemangku Adat dalam segi perkara Perdata

Tabel 6. Peran Pemangku Adat dalam segi Perkara Perdata

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	91	93,8
2.	Tidak	6	6,2
	Jumlah	97	100

(Sumber: Data olahan 2017)

Dari tabel 6 dapat disimpulkan bahwa 67 responden (69,1%) menjawab Ya untuk pergeseran Peran Pemangku Adat dalam segi Ladang, 30 responden (30,9%) menjawab Tidak.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Peran Pemangku Adat Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

a. Faktor dari dalam masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dari 5 (lima) faktor yang berasal dari dalam masyarakat terdapat 2 (dua) yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa, yaitu sebaga berikut:

1. Bertambahnya penduduk

Tabel 7. faktor yang berasal dari dalam masyarakat yaitu bertambahnya Penduduk.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	57	58,8
2.	Tidak	40	41,2
	Jumlah	97	100

Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa 57 responden (58,8%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang berasal dari dalam masyarakat yaitu bertambahnya penduduk sedangkan 40 responden (41,2%) menjawab Tidak.

2. Penemuan Penemuan Baru

Tabel 8 Faktor yang berasal dari dalam masyarakat yaitu Penemuan-Penemuan Baru.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	52	53,6
2.	Tidak	45	46,4
	Jumlah	97	100

Dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa 52 responden (53,6%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang berasal dari dalam masyarakat yaitu penemuan-penemuan baru sedangkan 45 responden (46,4%) menjawab Tidak.

b. Faktor Dari Luar Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dari 3 (tiga) faktor yang berasal dari luar masyarakat terdapat 1 (satu) faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran terhadap peran pemangku adat dalam pemerintahan desa. yaitu sebagai berikut:

Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Tabel 9. faktor yang berasal dari luar masyarakat yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	85	87,6%
2.	Tidak	12	12,4%
	Jumlah	97	100

Dari tabel 9 dapat disimpulkan bahwa 85 responden (87,6%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang berasal dari luar masyarakat yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain sedangkan 12 responden (12,4%) menjawab Tidak.

c. Faktor Yang Mendorong Jalannya Proses Perubahan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan dari 10 faktor yang mendorong jalannya perubahan terdapat 7 (tujuh) faktor yang menyebabkan pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa. yaitu sebagai berikut:

1. Kontak Dengan Kebudayaan Lain

Tabel 10. faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu kontak dengan kebudayaan lain.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	87	89,7%
2.	Tidak	10	11,3%
	Jumlah	97	100

Dari tabel 10 dapat disimpulkan bahwa 87 responden (89,7%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu kontak dengan kebudayaan lain sedangkan 10 responden (11,3%) menjawab Tidak.

2. Sistem Pendidikan Formal Yang Maju

Tabel 11 faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu sistem pendidikan formal yang maju.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	70	72,2%
2.	Tidak	27	27,8%
	Jumlah	97	100

Dari tabel 11 dapat disimpulkan bahwa 70 responden (72,2%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu sistem pendidikan formal yang maju sedangkan 27 responden (27,8%) menjawab Tidak.

3. Keinginan-Keinginan Untuk Maju

Tabel 12 faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu keinginan-keinginan untuk maju.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	69	71,1
2.	Tidak	28	28,9
	Jumlah	97	100

Dari tabel 12 dapat disimpulkan bahwa 69 responden (71,1%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu keinginan keinginan untuk maju sedangkan 28 responden (28,9%) menjawab Tidak.

4. Toleransi terhadap perbuatan perbuatan yang menyimpang (*diviation*) yang bukan merupakan delik

Tabel 13. faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu Toleransi terhadap perbuatan perbuatan yang menyimpang (*diviation*) yang bukan merupakan delik.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	52	53,6
2.	Tidak	45	46,4
	Jumlah	97	100

Dari tabel 13 dapat disimpulkan bahwa 52 responden (53,6%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu Toleransi terhadap perbuatan perbuatan yang menyimpang (*diviation*) yang bukan merupakan delik sedangkan 48 responden (46,4%) menjawab Tidak.

5. Sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*)

Tabel 13 faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*).

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	50	51,5%
2.	Tidak	47	48,5%

Dari tabel 13 dapat disimpulkan bahwa 50 responden (51,5%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu sistem terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*) sedangkan 47 responden (48,5%) menjawab Tidak.

6. Penduduk yang heterogen

Tabel 14 faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu penduduk yang heterogen.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	69	71,1%
2.	Tidak	28	28,9%
	Jumlah	97	100

Dari tabel 14 dapat disimpulkan bahwa 69 responden (71,1%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu penduduk yang heterogen sedangkan 28 responden (28,9%) menjawab Tidak.

7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu

Tabel 15 faktor yang mendorong jalannya proses perubahan yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu.

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Ya	72	74,2%
2.	Tidak	25	25,8%
	Jumlah	97	100

Dari tabel 15 dapat disimpulkan bahwa 72 responden (74,2%) menjawab Ya untuk faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat yang mendorong jalannya perubahan yaitu ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu sedangkan 25 responden (25,8%) menjawab Tidak.

Rekapitulasi Pergeseran Peran Pemangku Adat Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
1	25	25,8	72	74,2	97	100
2	87	89,7	10	10,3	97	100
3	78	80,4	19	19,6	97	100
4	89	91,8	8	8,2	97	100
5	88	90,7	9	9,3	97	100
6	37	38,1	60	61,9	97	100
7	89	91,8	8	8,2	97	100
8	91	93,8	6	6,2	97	100
No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	F	%
	F	%	F	%		
Jumlah	584	602,1	192	197,9	776	800
Rata-Rata	73,0		24,0		97	
Persentase		75,3		24,7		100

(Sumber :Data Olahan 2017)

Dari tabel di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari 97 responden yang menyatakan Ya adalah 75,3%, yang menyatakan Tidak adalah 24,7%. yang menyatakan Ya pada peran Pemangku adat dalam segi perceraian, hutan tanah, ternak, ladang , perkara perdata , dan perkara pidana.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Peran Pemangku Adat Dalam Pemerintahan Desa Di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak		F	%
	F	%	F	%		
9	57	58,8%	40	41, 2%	97	100%
10	-	-	97	100%	97	100%
11	52	53,6%	45	46,4%	97	100%
12	35	36,1%	62	63,9%	97	100%
13	10	10,3%	87	89,7%	97	100%
14	-	-	97	100%	97	100%
15	37	38,1%	60	61,9%	97	100%
16	85	87,6%	10	12,4%	97	100%
17	87	89,7%	10	11,3%%	97	100%
18	70	72,2%	27	27,8%	97	100%
19	-	-	97	100%	97	100%
20	69	71,1%	28	28,9%	97	100%
21	52	53,6%	45	46,4%	97	100%
22	50	51,5%	69	71,1%	97	100%

23	69	71,1%	28	28,9%	97	100%
24	72	74,2%	25	25,8%	97	100%
25	39	40,2%	58	59,8%	97	100%
26	-	-	97	100%	97	100%
No Tabel	Jawaban Responden				Jumlah	
	Ya		Tidak			
	F	%	F	%	F	%
Jumlah	784	808,1	982	1,015.0		
Rata-Rata	43		54		97	
Persentase		44		56		100

Berdasarkan tabel rekapitulasi persentase jawaban responden dapat disimpulkan bahwa yang menjawab Ya adalah 44% sedangkan yang menjawab tidak adalah 56% yang menyatakan Ya pada faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa yaitu, kontak dengan kebudayaan lain yaitu 89,7%, pengaruh kebudayaan masyarakat lain yaitu 87,6%, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu yaitu 74,2%, sistem pendidikan formal yang maju yaitu 72,2%, penduduk yang heterogen yaitu 71,1%, keinginan keinginan untuk maju yaitu 71,1%, bertambahnya penduduk yaitu 58,8%, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*) yaitu bukan merupakan delik dan penemuan penemuan baru yaitu 53,6%, terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*) yaitu 51,5%. dari tabel diatas dapat disimpulkan baha faktor utama yang menyebabkan pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa adalah faktor kontak dengan kebudayaan lain yaitu 89,7%.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Persentase Jawaban responden mengenai pergeseran peran pemangku ada dalam pemerintahan desa di desa banjar benai kecamatan benai kabupaten kuantan singingi pada kategori Ya dengan persentase sebesar 75,3% , dan responden yang menjawab Tidak adalah 24,7%. pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa di desa banjar benai kecamatan benai kabupaten kuantan singingi yang bergeser adalah: peran pemangku adat dalam segi perceraian, hutan tanah, ternak, ladang, perkara perdata dan perkara pidana. Dan Peran Pemangku Adat dalam pemerintahan Desa di Desa Banjar Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak bergeser adalah dalam segi Nikah Kawin dan Harta Pusaka sedangkan untuk Faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa di desa banjar benai kecamatan benai kabupaten kuantan singingi pada kategori Ya degan persentase sebesar 44% , dan responden yang menjawab Tidak adalah 56%. Faktor penyebab pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa di desa banjar benai kecamatan benai kabupaten kuantan singingi yaitu Faktor: kontak dengan kebudayaan lain, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, Sistem pendidikan formal yang maju, penduduk yang heterogen, keinginan keinginan untuk maju, bertambahnya penduduk, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (*deviation*) yaitu bukan merupakan delik dan penemuan penemuan baru dan terbuka lapisan masyarakat (*open stratification*). Dapat disimpulkan bahwa

faktor utama yang menyebabkan pergeseran peran pemangku adat dalam pemerintahan desa adalah faktor kontak dengan kebudayaan lain yaitu 89,7%.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut : Bagi Pemerintah Agar pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya peduli dan memperhatikan pemangku adat serta membuat PERDA secara khusus tentang Peran atau kedudukan Pemangku Adat sehingga ada literatur yang jelas mengenai kedudukan dan peran pemangku adat di kabupaten kuantan singingi dan dengannya adanya PERDA tersebut pemangku adatpun merasa dianggap, diperhatikan dan dihargai oleh pemerintah sehingga nantinya akan terjadi suatu hubungan kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan pemangku adat dalam menangani permasalahan anak cucu kemenakan di dalam suatu Desa jadi dengan adanya PERDA tersebut peran pemangku adat tetap terpelihara dengan baik dan Bagi Masyarakat supaya tetap mengormati, menghargai pemangku adat dan menerapkan nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. dan kepada masyarakat khususnya orang tua memberikan pemahaman tentang nilai-nilai adat dan memberitahu tentang pemangku adat kepada anaknya supaya anak juga mengetahui mana pemangku adatnya karna yang terjadi di masyarakat sekarang banyak anak-anak yang tidak tahu apa itu pemangku adat dan bagaimana perannya didalam pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak Prof. Dr. H. M Nur Mustafa, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Ayahanda selaku ketua jurusan P.IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibunda Sri Erlinda, S.IP. M.Si selaku ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dan selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, serta meluangkan waktu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini .
4. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, serta meluangkan waktu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Haryono, M.Pd selaku dosen Penasehat Akademik yang telah rela meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, serta pentunjuk kepada penulis
6. Bapak Supentri, M.Pd selaku ketua Laboratorium PPkn yang telah rela meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan, serta pentunjuk kepada penulis sehingga dalam penyusunan Skripsi ini berjalan dengan lancar.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP (Bapak Drs. Zahirman, MH, Bapak Dr. Hambali, M,Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH, dan Bapak Saparen, S.Pd, MH) yang selama ini telah mencurahkan ilmunya dan telah mendidik serta mengajar penulis.
8. Kepada bapak (Mujas Mardis) dan omak (Yulisma) penulis yang tak kenal lelah memberi kasih sayang yang begitu tulus, dukungan untuk tidak mudah putus asa serta selalu mendo'akan penulis menjadi orang sukses dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hamidy UU. 2000. *“Masyarakat Adat Kuantan Singingi”*. Pekanbaru: UIR
- Jati kuntari. 2015. Analisis tentang Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Adat Perkawinan masyarakat Jawa Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Sudjono, Anas. 2008. *“Pengantar Statistika Pendidikan”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwardi, dkk. 2006. *“Pemutakhiran Adat Kuantan Singingi”*. Pekanbaru: Alaf Riau
- Sumarsono S. 2005. *“Pendidikan Kewarganegaraan”*. Jakarta
- Pattiro.2015. *“Anotasi Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa”* Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO)